



ISBN 978-602-70083-4-2

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
di Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2014)**

Mochamad Kohar Mudzakar¹, Veronika Listi Ferdini Damopoli²
^{1,2}(Universitas Widyatama Bandung)

ABSTRACT: *This study aims to investigate how much influence economic growth, local revenue, general allocation fund, and specific allocation fund the capital expenditure on the Regional Government of Regency / City in West Java province in 2012-2014. Factors tested in this study is economic growth, local revenue, general allocation fund, and specific allocation fund as independent variables. While capital spending as the dependent variable.*

The method used in this research is descriptive and explanatory. The population in this study is the Regional Government of Regency / City in West Java province in the period 2012-2014 a total of 27 District / City. Sample selection technique used in this research was non probability sampling with purposive judgment sampling method, the number of samples to companies that have profit as much as 23 District / City. While data analysis used in this study is panel data regression analysis with multiple linear regression method at a significance level of 5%. The program used to analyze the data using Eviews 8.

The results showed that the partial economic growth, local revenue, general allocation fund, and specific allocation fund significant effect on capital spending. While simultaneously showing that economic growth, local revenue, general allocation fund, and specific allocation fund significant effect on capital spending. In addition research shows that the influence of economic growth, local revenue, general allocation fund, and specific allocation fund in contributing influence on capital spending by 85.2%

Keywords: *Economic Growth, Local Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, and Capital Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintah Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintah, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk



kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan jenis Pendapatan Asli Daerah lain yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya dimana rata-rata belanja modal hanya mendapatkan sebesar 12,8% dari total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih baik dalam mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah, uang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2012- 2014)”.

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu seberapa besar pengaruh:

1. Pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.



3. Dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
4. Dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
5. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh:

1. Pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
4. Dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
5. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2009: 44). Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2010: 1).

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut di antaranya adalah produk domestik regional bruto (BPS, 2008: 3). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS, 2008 : 5). PDRB per kapita adalah hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS, 2008 : 8).

Dalam PDRB Jawa Barat tahun 2008, menyebutkan 9 sektor ekonomi, yaitu sektor:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri dan Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih



5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Berdasarkan BPS (2010 : 5) perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS, 2003).

Pendekatan penyusunan PDRB Kabupaten/ Kota atas dasar harga berlaku berdasarkan BPS (2008 : 5) dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni:

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)
3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Dari artikel <http://infostatntb.wordpress.com/pengertian-pdrb-2/metode-perhitungan-pdrb>, pendekatan metode langsung perhitungan PDRB:

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan. Jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)



Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di dalam suatu wilayah. Jadi produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk PDRB tersebut.

Metode langsung dapat dilakukan dengan perhitungan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah bruto provinsi ke masing-masing kegiatan ekonomi di tingkat kabupaten/ kota. Sebagai alokatornya digunakan indikator yang paling relevan atau erat kaitannya dengan produktivitas/ pendapatan dari kegiatan sektor tersebut. Sedangkan ada empat metode penyusunan PDRB Kabupaten/ Kota yang cukup dikenal dalam harga konstan (BPS, 2008 : 9).

Empat metode penyusunan PDRB dalam harga konstan:

1. Revaluasi

Metode revaluasi adalah menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun atau tahun berjalan dengan harga tahun dasar tahun 2000, sehingga diperoleh output dan biaya atas dasar harga konstan tahun 2000.

2. Ekstrapolasi

Untuk memperoleh nilai tambah bruto (NTB) masing-masing tahun atas dasar harga konstan tahun 2000 yaitu dengan cara mengalikan nilai tambah masing- masing sektor harga konstan pada tahun dasar tahun 2000 dengan indeks produksi (tahun 2000 = 100).

3. Deflasi

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan metode deflasi diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun atau tahun berjalan dengan indeks harga (tahun 2000 = 100).

4. Deflasi berganda

Metode deflasi berganda hampir sama dengan metode deflasi, perbedaannya hanya pada cara mendeflasikan nilai output dan biaya di antaranya dengan indeks harga masing-masing yang mewakili/ sesuai.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Siregar (2015 : 31) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah.”

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa:



“Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.”

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa:

“Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup”.

2.5. Belanja Modal

Menurut Halim (2007: 101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

2.5.1. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2010 : 1). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2009 : 44). Syarat fundamental untuk pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5.2. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada



daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002 : 52).

2.5.3. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

2.5.4. Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, diartikan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Departemen Keuangan, 2004). Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan memiliki pengaruh pada besarnya belanja pemerintah daerah, dan sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Khusus yang didapat menunjukkan semakin tergantung pemerintah daerah pada pemerintah pusat, yang berarti bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

2.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Justin Yifu Lin & Zhiqiang Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang



mendorong daerah untuk mengalokasikan secara efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yuli Yustikasari (2006), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan Sukriy Abdullah dan Abdul Halim (2004), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Miharabi (2013) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

2.7. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2009 : 44).

Untuk mengukur keberhasilan kinerja perekonomian indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian di antaranya adalah produk domestik regional bruto (BPS, 2008: 3). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (Saragih, 2003). Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS, 2008).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti kita ketahui bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki kekayaan sumber daya, khususnya alam, yang sama antara satu dengan lainnya. Dengan adanya Dana Alokasi Umum, daerah yang kurang sumber daya alam akan terbantu sebab daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang sumber daya alamnya kaya (Baldrick & Bonni, 2001).

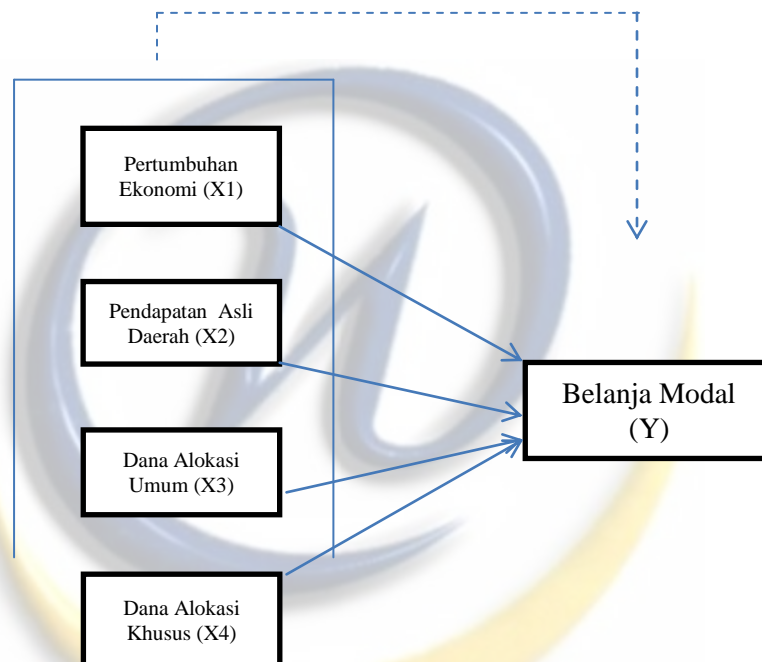
Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan memiliki pengaruh pada besarnya belanja pemerintah daerah, dan sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Khusus yang didapat menunjukkan semakin tergantung pemerintah daerah pada pemerintah pusat, yang berarti bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan

sebagai tolak ukurnya karena Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah.

Kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

_____ : parsial

-----: simultan

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

H5: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.



3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu (Husen Umar, 2005 : 303).

Objek penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen, dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *explanatory* dengan menggunakan pendekatan survey. Menurut Hermawan (2009 : 20) pengertian penelitian *explanatory* adalah sebagai berikut:

“*Explanatory research* merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.”

3.2.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2014.

Berdasarkan kriteria yang dipakai sampel adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat :

1. Yang memiliki pendapatan daerah aktif
2. Dapat membiayai daerahnya sendiri, baik Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
3. Yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD secara konsisten dari tahun 2012-2014

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu sejumlah 15 kabupaten dan 8 kota.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan tergambar lebih rinci pada tabel 3.1. berikut:



Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Pertumbuhan Ekonomi (X1) (Tambunan, 2009 : 44)	PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Pertambangan & Penggalian • Industri Pengolahan • Listrik, Gas Kota & Air Bersih • Konstruksi • Perdagangan Hotel & Restoran • Pengangkutan & Komunikasi • Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan • Jasa-jasa 	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X2) (Nasir, 2006 : 44)	Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • Pajak Parkir • Pajak Air Tanah • Pajak Sarang Burung Walet • Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 	
	Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Kesehatan • Retribusi Pelayanan Persampahan • Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 	



		<ul style="list-style-type: none">• Retribusi Pelayanan Pasar• Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran• Retribusi Sewa Alat Berat• Retribusi Pemanfaatan Tanah• Retribusi Terminal• Retribusi Rumah Potong Hewan• Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga• Retribusi Pengelolaan Limbah Cair• Retribusi Penjualan Produksi Daerah• Retribusi Iuran Tetap Usaha Pertambangan• Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak Ikutannya• Retribusi Ijin• Gangguan / Keramaian (HO)• Retribusi Ijin Trayek• Retribusi Ijin Usaha Perikanan• Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Retribusi Ijin Usaha Pariwisata• Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan• Retribusi Ijin Bongkar Maut• Retribusi Ijin Pengusahaan Angkutan Karyawan• Retribusi Ijin Air Bawah Tanah• Retribusi Pelayanan Bidang Ketegakerjaan• Retribusi Penggantian Biaya Akte• Retribusi Ijin Pemanfaatan Tanah• Retribusi Ijin Usaha Bidang Perdagangan• Retribusi Ijin Usaha Bidang Perindustrian• Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan	<ul style="list-style-type: none">• Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD	



	Daerah yang Dipisahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara BUMN • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat • Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 	
	Lain-lain PAD yang Sah	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Giro • Pendapatan bunga • Penerimaan atas tuntutan ganti rugi • Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah • Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing • Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan • Pendapatan denda pajak • Pendapatan denda retribusi • Pendapatan eksekusi atas jaminan • Pendapatan dari pengembalian • Fasilitas sosial dan umum • Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan • Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan 	
Dana Alokasi Umum (X3)	Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat		
Dana Alokasi	Dana Alokasi Khusus yang		



Khusus (X4)	diberikan pemerintah pusat.		
Belanja Modal (Y) (Anggiat, 2009:14)	Belanja Modal Tanah		
	Belanja Modal Peralatan dan \Mesin		
	Belanja Modal Gedung & Bangunan		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Belanja Modal Fisik Lainnya		

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penulis memperoleh data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik Jawa Barat berupa data kuantitatif, yaitu Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

3.2.4. Teknik Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji secara parsial, dan simultan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan data, dan hasil pengujian hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.



1) Uji Normalitas

Cara untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan :

- (1) Analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.
- (2) Analisis statistik menganjurkan untuk meminimalkan tingkat kesalahan maka analisis grafik dilengkapi dengan uji statistik. (Imam Ghozali, 2013:160).

Dalam *software* Eviews normalitas sebuah data dapat dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal, sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera (J-B) dan Probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung (Winarno, 2011 : 5.39).

2) Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat sebagai berikut :

- (1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- (2) Menganalisis matriks korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- (3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari :
 - a. Nilai tolerance dan lawannya
 - b. Variance Inflation Factor (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. (Imam Ghozali 2013:105).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu dengan melihat nilai signifikansi di atas tingkat $\alpha=5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. (Imam Ghozali, 2013: 139-143).

4) Uji Autokorelasi

Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan angka Durbin Watson (DW). Uji Durbin Watson (Durbin-Watson Test) digunakan untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin Watson (DW Test). Adapun kriterianya

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kriteria Angka Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Imam Ghozali (2013 : 110)

3.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2010 : 277).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk mempermudah melakukan perhitungan secara statistik, maka semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan *software* Eviews 8. Berikut ini merupakan model regresi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

berganda yang digunakan dalam penelitian ini :

Keterangan:

Y : Belanja Modal (BM)

X2: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α : Konstanta

X3: Dana Alokasi Umum (DAU)

β : Slope dan koefisien regresi atau intersep

X4: Dana Alokasi Khusus (DAK)

X1: Pertumbuhan Ekonomi

e : error

3.2.6 Penetapan Tingkat Signifikansi (α)

Tingkat signifikan (*significant level*) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% karena dinilai cukup untuk menguji hubungan antara variabel yang diuji bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Tingkat signifikansi 0,05 artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%.

3.2.7 Kecocokan Model (*Goodness and Fit*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 97). Rumus untuk menghitung koefisien determinasi menurut Sugiyono (2012 : 257) adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd : koefisien determinasi

r^2 : koefisien korelasi yang dikuadratkan

Berdasarkan rumus di atas maka hasil perhitungan dapat dikategorikan dalam kriteria besarnya pengaruh berdasarkan tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Koefisien Determinasi

Interval	Tingkat Pengaruh
0% - 19,9%	Sangat rendah
20% - 39,9%	Rendah
40% - 59,9%	Sedang
60% - 79,9%	Kuat
80% - 100%	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2012

3.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan pada rumusan masalah, maka dilakukan pengujian hipotesis. Karena hipotesis yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari lima hipotesis. Empat hipotesis di uji secara parsial dan satu hipotesis di uji secara simultan.

1. Pengujian Hipotesis Parsial (uji t)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dan variabel

dependen. Hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis tidak adanya pengaruh, hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh.

Adapun hipotesis statistik secara parsial yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) $H_{01} \neq$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

H_{a1} = Terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

2) $H_{02} \neq$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

H_{a2} = Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

3) $H_{03} \neq$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

H_{a3} = Terdapat pengaruh yang signifikan dana alokasi umum terhadap belanja modal

4) $H_{04} \neq$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal

H_{a4} = Terdapat pengaruh yang signifikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal

Kriteria Pengambilan keputusan :

• H_0 ditolak jika sig. $t < 0,05$

• H_0 diterima jika sig. $t < 0,05$

Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat tingkat signifikansi dengan cara t hitung dibandingkan dengan t tabel untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan ketentuan :

• Jika t hitung $> t$ tabel, atau t hitung $< -t$ tabel maka H_0 ditolak (signifikan)

• Jika $-t$ tabel $\leq t$ hitung $\leq t$ tabel, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

2. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis tidak adanya pengaruh, umumnya di formulasikan untuk ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Adapun hipotesisnya sebagai berikut :

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y).

$H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$, artinya ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel



independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y).

3.2. Rancangan Uji Hipotesis

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis secara parsial peneliti menggunakan bantuan software Eviews 8.

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian

Objek penelitian adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Variabel dependen yaitu belanja modal, sedangkan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Subjek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2012-2014 yang memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 23 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu sejumlah 15 Kabupaten dan 8 Kota. Data tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat pada periode 2012-2014.

4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini digunakan uji Jarque Bera menguji normalitas model regresi dan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software Eviews 8.

4.2.1 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi adalah dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF). Uji ini dilakukan dengan menggunakan VIF dengan kriteria jika nilai VIF variabel bebas < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas

tersebut terjadi multikolinearitas.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat nilai hasil uji Glejser dengan menggunakan software Eviews 8.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test).

4.2.4 Uji Kecocokan Model

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R^2 dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.

4.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang digunakan penulis adalah persamaan model regresi berganda (multiple regression analysis).

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Parsial

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila nilai $\text{sig. } t < \text{tingkat signifikan } (0,05)$, maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai $\text{sig. } t > \text{tingkat signifikan } (0,05)$, maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.4.2 Uji Simultan

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.



4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memberikan kontribusi terhadap belanja modal sebesar 27,8%. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2010:1).

Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi (Lin dan Liu, 2000). Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

Kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula anggaran belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur daerah, sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja modalnya. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula belanja modal. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Ardhani (2011), Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4.5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, besarnya pengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap belanja modal sebesar 36,2%. Hasil penelitian ini juga didukung oleh UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan



daerahnya maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002: 52).

Semakin tingginya pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah dapat membiayai sendiri kebutuhan belanja modal daerahnya dalam rangka membangun infrastruktur daerah dengan lebih leluasa. Jadi semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula belanja modal. Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Abdullah dan Halim (2004) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, besarnya pengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap belanja modal sebesar 21,2%. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jadi untuk daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang masih rendah, semakin tinggi dana alokasi umum, akan semakin tinggi pula belanja modal. Hasil penelitian ini dukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Abdullah dan Halim (2004) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.5.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian Miharabi (2013), bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

4.5.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.



Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap belanja modal sebesar 85,2%. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah, serta semakin tinggi dana transfer pemerintah pusat yaitu berupa dana alokasi umum, dan khusus maka akan semakin tinggi pula belanja modal suatu daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan besarnya pengaruh termasuk ke dalam kategori rendah.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan besarnya pengaruh termasuk ke dalam kategori rendah.
3. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan besarnya pengaruh termasuk ke dalam kategori rendah.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan besarnya pengaruh termasuk ke dalam kategori rendah.
5. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan besarnya pengaruh termasuk ke dalam kategori rendah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah.
 - 2) Pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
 - 3) Efektivitas penggunaan dana alokasi umum dengan memaksimalkan penggunaan dana tersebut dalam membiayai belanja daerah.
 - 4) Efektivitas penggunaan dana alokasi khusus dengan memaksimalkan penggunaan dana tersebut dalam membiayai belanja daerah.
 - 5) Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah sebagai bentuk investasi jangka panjang dengan meningkatkan efektivitas penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai belanja



modal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Menambah variabel seperti, dana bagi hasil, SiLPA, dan lainnya yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap belanja modal .
- 2) Dapat menggunakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi lainnya.
- 3) Menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003. Surabaya.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Diponegoro.
- Abuyamin, Oyok. 2010. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Surat Pendekataan Praktik. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2008. PDRB Kabupaten/ Kota Di Jawa Barat. 2006-2008. Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2010. PDRB Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2010-2012. Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2015. PDRB Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2013-2015. Bandung.
- Baldric & Bonni. 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana : Edisi 1. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : PT Erlangga.
- Bhuono, Agung Nugroho. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Darwanto dan Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. BPFU UGM. Yogyakarta.
- Erlina, Omar, et al. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Yogyakarta : KOMPAK STIE YO.
- Halim, Abdul. 2002. Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.



- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Kusufi Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Husen, Umar. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago, Vol 49.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nazir, Mochamad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemkot/Pemkab Sumatera Utara. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Tambunan, Tulus. 2009. Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Zain, Muhammad & Hermana, Suryo. 2010. Himpunan Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: PT Indeks.
- Zulganef. 2008. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Website :
([http:// www. ksap. org/ Riset& Artikel/ Art16. pdf](http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf))
(<http://infostatntb.wordpress.com/pengertian-pdrb-2/metode-perhitungan-pdrb>)
(<http://www.inilahkoran.com>)
(<http://www.kompas.com>)